

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agustina, L. (2009). *Pengaruh Konflik Peran, Ketidakjelasan Peran, dan Kelebihan Peran terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Auditor*. Jurnal Akuntansi, 1(1), 40–69.
- Biddle, B. J. (1986). Recent developments in role theory. *Annual review of sociology*, 12(1), 67–92.
- Dr. Mardi Candra. S.Ag., M.Ag., M.H., CPM., CPArb. (2024). *BIROKRASI DAN GOOD GOVERNANCE*. KENCANA JI. Tandra Raya No. 23 Rawamangun Jakarta 13220 Telp: (021)478-64657 Faks: (021)475-4134.
<https://books.google.co.id/books?id=XjH7EAAAQBAJ&lpg=PP1&ots=5NxELQMECo&dq=UNDP%201922%20GOOD%20GOVERNANCE&lr&hl=id&pg=PR4#v=onepage&q&f=false>
- Lexy, J. M. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Kriyantono, R. (2015). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kuantitatif, P. P. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Linton, R. (1936). *The Study of Man*. New York: Appleton-Century-Crofts. *Hysterical Psychoses and Possessions*, 67.
- Mead, G. H. (1934). *Mind, Self, and Society*. Chicago: Univ. of Chicago Press. MERTON, RK (1957) *Social Theory and Social Structure*, New York: Free Press. MIYAMOTO, SF and S. DORNBUSCH (1956)" A test of the hypothesis of self-conception." *Amer. J. of Sociology*, 61, 399–403.
- Merton, R. K. (1957). *Social Theory and Social Structure*. Glencoe: Free Press.

- Miyamoto, S., & Dornbusch, S. M. (1956). *Socialization and Social Roles*. Tokyo: University of Tokyo Press.
- Nazir, M. (2014). *Metode penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Teori Peranan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (1990). *Beberapa Teori Sosiologi tentang Struktur Masyarakat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Taliziduhu, N. (1981). *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Widjaja. (t.t.). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh / Widjaja Perpustakaan Mahkamah Konstitusi* (Ed.1. Cet.2.). Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004. Diambil 7 Mei 2025, dari <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=7502>
- Yin, R. K. (1997). *Case Study Research: Design and Methods*. Thousand Oaks: Sage Publications.

Jurnal Dan Artikel

- Ahmad, R., Gunawan, B. P., & Supangkat, A. (2021). Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Keuangan Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum*, 4(1), 23–27.
- Amanulloh, N. (2015). *Demokratisasi desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Arief Rahman, S. (2018). Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Pemerintahan Desa*, 3(2), 45–60.
- Asmayandi, A., Zulhadi, Z., & Kurniawan, T. L. (2023). Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Legislasi BPD Berdasarkan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2016. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 2(8), 3147–3166.
- Ebimobowei, A., Kereotu, O. J., & Brass Island, P. (2011). Role theory and the concept of audit expectation gap in South-South, Nigeria. *Current Research Journal of Social Sciences*, 3(6), 445–452.
- Heri, R., Nasution, M. A., & Isnaini, I. (2020). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah terhadap Dana Desa. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 2(2), 190–203.
- Harahap, s. B. (2024). Peran badan permusyawaratan desa dalam pengawasan dana desa berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 di desa ujung gading kabupaten labuhanbatu selatan perspektif fiqh siyasah (doctoral dissertation, universitas islam negeri sultan syarif kasim riau).
- Junior, I. K. G. A., Wijaya, I. K. K. A., & Arthanaya, I. W. (2021). Efektivitas Pengawasan BPD terhadap
- Kementerian Keuangan. (2025). *Rilis Pagu Dana Desa Tahun 2025*. Diakses 7 Mei 2025, dari <https://www.bancak.id/artikel/2024/10/29/kementerian-keuangan-rilis-pagu-dana-desa-tahun-2025>
- Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(2), 391–396.
- Made Aristia Prayudi, Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi, Diota Prameswari Vijaya, & Luh Putu Ekawati. (2019). *TEORI PERAN DAN KONSEP EXPECTATION-GAP FUNGSI PENGAWASAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA: Vol.* <https://ejournal.stiesia.ac.id/ekuitas/issue/view/62>.
- Prabowo, A. (2019). Transparansi Dana Desa dalam Perspektif Governance. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(2), 112–120.
- Pratama, D., & Minollah, H. (2022). Peran BPD dalam Mewujudkan Tata Kelola Desa yang Baik. *Jurnal Pemerintahan Daerah*, 7(1), 55–63.
- Punu, H. (2016). Pengawasan BPD terhadap Implementasi APBDes. *Jurnal Administrasi Desa*, 4(1), 88–95.

- Rahayu, T., & Muthali'in, A. (2016). Fungsi Pengawasan BPD dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Sosial Politik*, 8(2), 77–84.
- Rumbia, E., Normawati, N., & Soselisa, P. S. (2023). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Di Desa Waiheru Kecamatan Teluk Ambon Baguala). *Journal Of Business, Finance, and Economics (JBFE)*, 4(1), 157-166.
- Susanda, A., dkk. (2024). Peran BPD terhadap Keuangan Desa di Kecamatan Natal. *Jurnal Pemerintahan Desa*, 5(1), 3147–3166.
- Sofiyanto, M., Mardani, R. M., & Salim, M. A. (2017). Pengelolaan dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang. *E-JRM: Elektronik Jurnal Riset Manajemen*, 6(04).
- Vebyangga, M. (2019). Transparansi dan Akuntabilitas Dana Desa di Era Digital. *Jurnal Pembangunan dan Pemerintahan*, 2(2), 21–28.
- Wulandari, D., & Kadir, A. (2021). Peran BPD dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sei Merbau. *Jurnal Pembangunan Desa*, 3(2), 14–22.

Peraturan dan Undang Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Pemerintah Pusat. Undang-undang (UU) Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Pemerintah Pusat.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA.

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang. Pemerintah Pusat. Undang-undang (UU) NO. 8, LN.2005/NO.108, TLN NO.4548, LL SETNEG